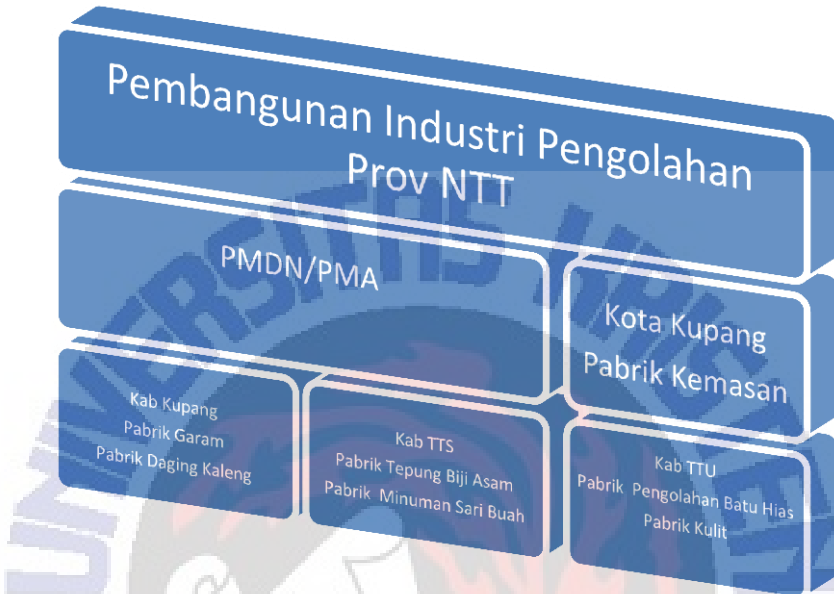


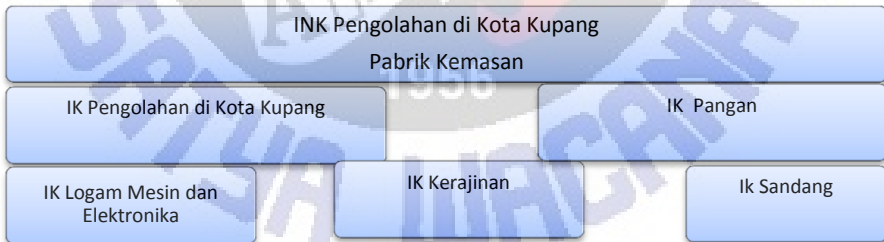
6. Industri pengolahan skala menengah/besar didirikan di kabupaten harus berfungsi sebagai *prime over* yang mampu memberi efek pertumbuhan industri pendukung dan terkait lainnya seperti: mendirikan pabrik kemasan/*packaging* di Kota Kupang, membangun pabrik daging sapi kaleng dan pabrik garam industri di Kabupaten Kupang, membangun pabrik tepung biji asam jawa dan pabrik minuman sari buah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mendirikan pabrik pengolahan batu hias dan pabrik kulit di Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Kebijakan pengembangan industri pengolahan selain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, yaitu klaster industri, bapak angkat mitra usaha industri kecil dan rantai nilai dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara konsisten sehingga pola pengembangan industri kecil pengolahan lebih fokus dan tidak terjadi tumpang tindih model pengembangan yang dilakukan oleh setiap level pemerintah, hal ini akan memudahkan dalam proses evaluasi nantinya.
8. Pendekatan pengembangan industri pengolahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dimulai dari : Perorangan, KUB/KUBE, Sentra, Koperasi, *OVOP*, *Grammen Bank*, Inkubator, *Community Based Development*, Model Ventura, *Subcontracting*.
9. Kebijakan pengembangan industri pengolahan Provinsi NTT seperti Gambar 7.8.

Gambar 7.8 Model Pembangunan Industri Pengolahan Kawasan Timor Barat Provinsi NTT



Sedangkan pengembangan industri kecil pengolahan di Kota Kupang seperti nampak dalam Gambar 7.9.

Gambar 7.9 Pengembangan IK Pengolahan di Kota Kupang



Konsekuensi dari Kota Kupang sebagai kota pusat jasa dan perdagangan menjadi tempat pemasaran dari berbagai produk/komoditi dari kabupaten lainnya di Provinsi NTT. Sebagai Ibu Kota Provinsi NTT, Kota Kupang memiliki potensi konsumen yang memiliki daya beli yang tinggi disebabkan berdiam pula di kota ini aparatur sipil negara pemerintah pusat karena adanya beberapa urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat di daerah, aparatur sipil negara Provinsi NTT, pegawai negeri Kota Kupang, sebagian dari Kabupaten Kupang, dan sebagian kecil dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan penduduk yang tidak menetap, namun datang dan pergi beberapa waktu karena tugas dan atau bertugas di Kota Kupang.

Letak strategis Kota Kupang di antara 3 negara yaitu Indonesia, Australia dan Republik Demokratik Timor Leste menjadikan daerah ini memiliki prospek ke depan akan usaha jasa dan perdagangan, wilayah kota yang meliputi 6 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tidak memungkinkan untuk didirikannya pabrik pengolahan yang berdampak pada lingkungan.

Penetapan jenis industri pengolahan skala kecil di Kabupaten Kupang dimungkinkan berdasarkan hasil penelitian penulis, juga data-data sekunder baik potensi daerah, dan program pemerintah seperti nampak pada Gambar 7.10.

Gambar 7.10 Pengembangan IK Pengolahan di Kab. Kupang



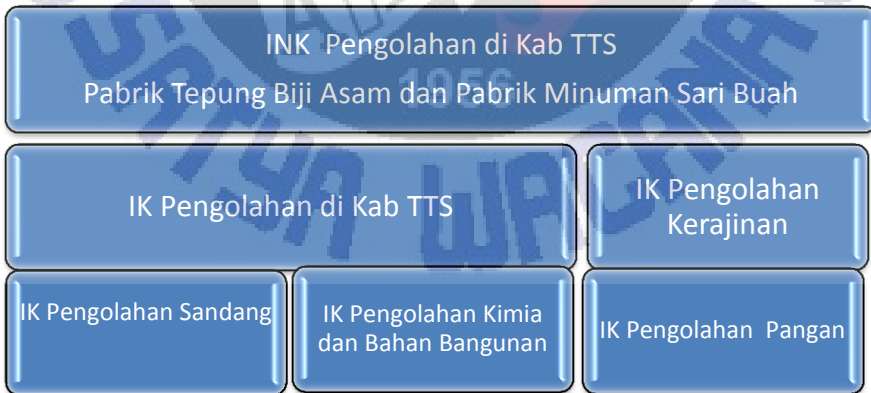
Wilayah Kabupaten Kupang sangat dimungkinkan untuk berkembang, karena selain luas wilayah baik secara geografis dan administratif pemerintahan sebanyak 24 kecamatan, kabupaten ini juga memiliki potensi sumber daya alam dengan dukungan faktor klimatologi dengan musim kemarau yang panjang serta daerah-daerah tertentu yang memenuhi persyaratan menjadi daerah penghasil garam

yang bisa diolah lebih lanjut menjadi garam industri. Padang sabana dan steпа yang luas memungkinkan bisa dipeliharanya ternak dalam jumlah yang besar sebagai sumber bahan baku didirikannya pabrik daging kaleng selain potensi ternak dari daerah lain di daratan Timor dan sekitarnya.

Industri turunan yang bisa dilakukan dalam skala kecil adalah industri pengawetan berbagai komoditi hasil perikanan dan kelautan yang menggunakan garam dan industri pengawetan bahan pangan, menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, industri kecil lainnya juga dimungkinkan untuk mensuplai pasar domestik wilayah Kabupaten Kupang dan sekitarnya termasuk Kota Kupang.

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi hasil kehutanan yang besar yaitu buah asam jawa. Pohon asam jawa tumbuh dengan subur di hampir seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara alami. Buah asam jawa yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik dan dipakai sebagai bahan baku kosmetik, bahan minuman dan makanan, serta komoditi lainnya. Buah asam jawa diekspor ke luar pulau ke berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri dalam bentuk gelondongan/mentah (masih dengan bijinya).

Gambar 7.11 Pengembangan IK Pengolahan di Kab. TTS

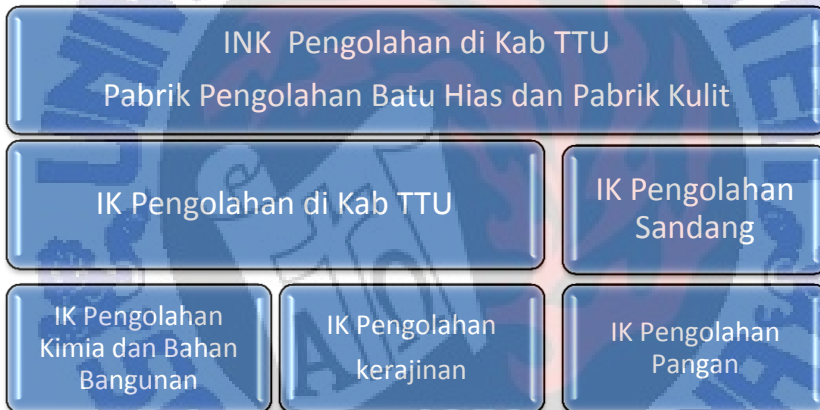


Biji buah asam jawa yang oleh masyarakat setempat dijadikan pakan ternak sedang, yaitu babi (dengan cara merendam terlebih

dahulu biji asam jawa dengan air sampai lunak), ternyata memiliki fungsi yang sangat penting dalam industri benang pada pabrik tekstil, karena biji buah asam jawa memiliki kandungan zat yang berfungsi sebagai pengikat warna pada benang. Bila sudah diproses menjadi tepung, biji asam jawa bernilai tinggi, sehingga sebenarnya nilai tambah dapat diperoleh masyarakat bukan dari daging buah asam jawa tetapi dari tepung biji asam jawa.

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terletak pada ketinggian, juga memiliki potensi lain yaitu aneka buah-buahan yang bisa diproses lebih lanjut menjadi sari buah. Buah-buahan seperti jeruk keprok soe, alpukat dll. tumbuh subur di daerah ini.

Gambar 7.12 Pengembangan IK Pengolahan di Kab. TTU



Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki topografi dan geografi dataran rendah yang hampir sama dengan Kabupaten Kupang. Sehingga potensinya bila ternaknya dipasok ke Kabupaten Kupang untuk bahan baku proses produksi daging kaleng, maka kulitnya dapat diolah menjadi bahan baku industri berbagai kerajinan dari kulit sapi, seperti tas, sepatu, jaket dll. serta industri kecil turunan lainnya yaitu kerajinan dari tulang dan gigi, serta pengolahan pangan seperti kerupuk seperti pada Gambar 7.12.

Daerah Timor Tengah Utara dianugerahi Tuhan dengan potensi batu yang dapat diolah menjadi berbagai bahan bangunan dan hiasan di

hotel-hotel berbintang yang belum pernah disentuh dalam skala besar dan turunannya dapat dibuat berbagai kerajinan dan perlengkapan rumah tangga. Selain itu hanya daerah ini yang memiliki potensi batu akik yang dipakai sebagai perhiasan baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan kualitas dan harga yang tinggi. Di samping kerajinan sandang tenun ikat yang ikut memperkaya khasanah tenun ikat NTT dengan motif khusus *Sotis* dan *Buna* yang terkenal sampai ke mancanegara.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kawasan Timor Barat

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat di Provinsi NTT dilakukan dalam bentuk program Desa Mandiri Anggur Merah, yang memberikan sejumlah dana kepada setiap desa/kelurahan yang terpilih dalam program ini. Dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2016 hasil evaluasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT (Victory News, Senin 27 Maret 2017 “Dana DEMAM Tak Berdampak Signifikan”) tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sebab pengelolaan Dana DEMAM belum efektif. Terdapat empat (4) aspek yang membutuhkan perhatian dan pembenahan yaitu ;

1) Perencanaan Program, di mana sasaran program belum ditentukan secara baik, hal tersebut sesuai dengan kondisi real yang penulis dapatkan dari lapangan, bahwa sasaran program didapat oleh pihak yang kurang tepat, yang mengakibatkan program tidak bisa dijalankan oleh pihak-pihak penerima program tersebut;

2) Aspek Tata Kelola atau pelaksanaan Program belum dilengkapi Juknis, hal ini pun sesuai dengan pengamatan penulis di lapangan di mana pengelolaan program Desa Mandiri Anggur Merah dilaksanakan oleh berbagai organisasi perangkat daerah, ada yang dikelola oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) seperti di Provinsi NTT yang seharusnya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) yaitu di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara dan ada yang di Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Hal

tersebut membuat koordinasi antara unit pembina sektor terkait program pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, apalagi pelaksanaan sampai di desa atau kelurahan? seperti pernyataan pihak BPK RI Pendapatan hibah dana DEMAM dan hibah bergulir tidak begitu mendapat perhatian. Harusnya desa berperan agar dimasukkan dalam laporan keuangan desadan aparat desa jugaikut memantau pemanfaatan dan penggulirannya untuk mencegah tumpang tindih dengan program lainnya, seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini tepat sesuai pernyataan Kepala Bappeda Prov NTT Ir. Wayan Darmawa MT (Victory News, 22 Maret 2017 “60 % Dana DEMAM Ngadat”) bahwa salah satu kendala yang menyebabkan rendahnya pengembalian dan perguliran dana DEMAM di masyarakat dari tahun 2011 s/d 2016 sebesar 40% dari Rp 664.500.000.000,- adalah belum adanya keterpaduan dan peningkatan pembinaan dari pemerintah desa. Masalah lainnya adalah tidak adanya monitoring dari pihak kecamatan dan kurangnya dukungan dari pemerintah kabupaten. Sesuai hasil penelitian penulis bahwa benar hal tersebut yakni kurangnya perhatian pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten terjadi demikian karena pemerintah desa tidak dilibatkan sejak awal didalam perencanaan program Demam sehingga tidak merasa memiliki program tersebut,

3) Pendampingan, di mana peran pendamping terhadap kelompok usaha belum optimal, “Para pendamping belum melaksanakan fungsi sesuai apa yang dikontrakkan, memang benar demikian, sebab para pendamping lebih banyak berada di luar desa binaan dibandingkan berada bersama kelompok karena kapasitas dan keterampilan yang terbatas bahkan tidak sesuai, hal tersebut sebagai dampak dari rekrutmen pendamping yang kurang memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari program ini, serta dampak dari juknis yang membingungkan mereka untuk melaksanakan tugas sesuai standar yang diinginkan

4) Aspek monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu 2011 s/d 2014 menunjukkan bahwa Bappeda sebagai pengelola program

harusnya melakukan monev perkembangan pengelolaan dana, sehingga dapat mengetahui kendala dalam pengendalian dana agar memberikan solusi, namun hal itu belum dijalankan secara baik. Hal ini semakin menegaskan ketidakberhasilannya program pemberdayaan masyarakat Desa Mandiri Anggur Merah, yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki Tupoksi perencanaan bukan pelaksana teknis, sehingga bagaimana mau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap diri sendiri? Sebagai perencana sekaligus pelaksana? .
Kalaupun monev tersebut dilakukan tentu hasilnya tetap tidak optimal.

Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan 31 rekomendasi sesuai hasil evaluasi tersebut yang dipadatkan menjadi 5 rekomendasi sebagai berikut : 1) Membentuk forum koordinasi yang intensif dan berkala dengan para Bupati dan Walikota se-NTT dengan salah satu tujuannya adalah menghindari tumpang tindih atau overlap pelaksanaan program-program sejenis. 2) Menyusun dan mengkaji ulang tujuan dan sasaran program secara lebih spesifik, sehingga kelompok yang diberi hibah dikaji kembali berapa kelompok yang produktivitasnya meningkat dan apa saja indikatornya agar menjadi bahan dalam mengevaluasi keberhasilan program 3) Membuat juknis pengelolaan program baik perencanaan dan pematapan kelompok, juknis pengelolaan dan juknis pelaporan, serta juknis evaluasi program. 4) Terkait pendampingan pemerintah Provinsi NTT diminta untuk menyusun program kerja pendamping yang lebih terukur untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja para pendamping. 5) Meminta Bappeda untuk menyusun evaluasi secara lebih terinci dan akurat sesuai indikator yang sudah ditetapkan.

Rekomendasi tersebut baru tuntas 2 poin atau 6,2 % dari 31 poin, sebanyak 29 poin atau 93,4 % masih dalam proses kondisi bulan Desember tahun 2016.

Pihak DPRD juga memberikan tanggapan serius (Victory News, 23 Maret 2017 “ Dewan Nilai Demam Gagal “) antara lain Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT mengatakan “ini program untuk bantu mengentaskan kemiskinan, tapi kalau seperti ini ya harus dibenahi, dan pemerintah Provinsi NTT yang baru diminta mengevaluasi ulang

secara menyeluruh dan jika tidak berhasil dan melakukan formulasi ulang dan diperbaiki secara menyeluruh dan hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT Yucun Lepa, menurut kedua wakil rakyat tersebut, rekomendasi BPK RI Perwakilan NTT agar dana DEMAM tersebut disalurkan melalui kelompok usaha yang sudah ada dan bukan membentuk kelompok baru yang tidak dilaksanakan sehingga masalah tersebut semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Secara tegas Yucun Lepa mengatakan harusnya dana tersebut disalurkan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa bergulir dan mendorong pengembangan UMKM dan memudahkan untuk menggulirkan kepada UKM lainnya, hal tersebut tidak dilakukan, dan sesuai dengan pengamatan penulis memang benar salah satu penyebab macetnya pengembalian dana bergulir tersebut karena yang menerima dana bukan masyarakat yang memiliki usaha, sehingga output yang diharapkan tidak tercapai. Ditambahkan bahwa dikhawatirkan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui dana DEMAM bisa tumpang tindih antara pengelolaan dana DEMAM maupun dana disebabkan aparat desa yang belum memiliki jiwa entrepreneurship untuk mengelola dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Usulan untuk mendisain ulang sistem penyaluran dana agar sebaiknya diberikan kepada UKM sehingga pemerintah mampu mengelola dana termasuk dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur, jalan, embung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain DEMAM sebagai program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Provinsi NTT, Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat melakukan hal yang sama yaitu miskin pemberdayaan masyarakat, dan hanya meningkatkan ekonomi aparat desa sesuai pendapat Pengamat Ekonomi UKAW Dr, Frits Fangidae (Victory News, 19 Juli 2017) bahwa dana desa yang mencapai Rp 1 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur di desa namun menggunakan kontraktor dana Rp 1 miliar dinikmati pihak ketiga Rp 900.000.000 dan Rp100.000.000,- untuk masyarakat desa.

Penguatan terhadap permasalahan terkait kegagalan program pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Provinsi NTT juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Prov NTT yang juga mantan Ketua Komisi IV Angelino da Costa (Victory News, 19 Juli 2017) mengungkapkan pihaknya sebagai mitra pemerintah selalu mendorong peningkatan pengawasan setiap program dan anggaran yang diturunkan ke desa, pasalnya sumber daya manusia di pedesaan belum siap untuk mengelola dana yang besar seperti yang dilakukan oleh program DEMAM dan Dana Desa. Namun lanjutnya pemerintah seolah melepas tanggung jawab kepada para pendamping program yang notabene hanya sekedar mencari uang, bukan untuk membantu masyarakat. Uji petik yang dilakukan Komisi IV di beberapa kabupaten ditemukan banyak masalah, misalnya masyarakat yang tidak bisa beternak dipaksa menjadi peternak, atau yang tidak bisa menjadi nelayan dipaksa melaut, sementara pendamping programnya tunggu ada uang atau gaji baru muncul di desa, beber Angelino yang mewakili dapil TTU, Belu dan Malaka itu.

Angelino menambahkan klaim pemerintah tentang keberhasilan program DEMAM yang mampu mengentaskan kemiskinan belum bisa diterima, pasalnya hasil uji petik di lapangan dari 100 desa penerima misalnya hanya sekitar 10 – 15 % yang berhasil. Apalagi pembentukan koperasi desa itu tidak bisa juga karena tidak berbadan hukum. Dengan demikian, lanjut Angelino pemerintah diminta untuk mencari pola pendekatan pembangunan yang lebih baik dan melibatkan masyarakat dalam menentukan program serta kebutuhan yang tepat. “Harus tepat sasaran dan tepat guna, jangan sampai peternak tetapi kita kasih alat tangkap ikan” tutup Angelino.

Pendapat wakil rakyat terkait posisi Provinsi NTT sebagai provinsi termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat atau urutan 31 dari 33 provinsi menegaskan sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat atau mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinannya, dan itu hanya bisa dicapai dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan hakekat, definisi dan

konsep dari pemberdayaan masyarakat itu tanpa unsur politik yang dominan dan itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yaitu melalui pengembangan industri kecil pengolahan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTT.

Kondisi ini turut menyumbang kesulitan bagi pemerintah pusat untuk menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke level satu digit atau di bawah 10 % sesuai paparan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR Jakarta tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut” Penurunan kemiskinan di bawah 10 % membutuhkan upaya ekstra karena hal itu bicara kemiskinan inti yang makin dalam” dan menutup penjelasannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mengatakan bahwa karena itu pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dari penduduk miskin (Victory News, 19 Juli 2017).